

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu pemerintahan atau organisasi. Dan laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Tuntutan masyarakat agar sektor publik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan banyak diungkapkan. Pemerintah menjawab tuntutan tersebut dengan menetapkan peraturan dalam UU No. Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dengan memberikan informasi laporan pertanggungjawab berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Dalam organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan penungkapan atas aktivitas dan kinerja laporan keuangan pemerintah kepada pemerintah yang pihak-pihak berkepentingan dengan laporan tersebut. Menurut (Khairudin dan Erlanda, 2016) tantangan pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) sangatlah besar, karena pelayanan publik yang telah dilakukan pemerintah telah tercemar dari berbagai tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang terjadi pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). *Good government governance* merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas

untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Perwujudan dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan harus melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah berdasarkan pada prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah tidak lain dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi serta didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang andal (Dewi Andini, 2019). Manfaat laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah memberikan pemenuhan kebutuhan informasi secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan dalam rangka menilai akuntabilitas serta dalam mengeluarkan keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Santoso dan Pambelum, 2008: 17).

Menurut Widari dan Sutrisno, Laporan keuangan ialah bagian yang paling penting yang berasal dari proses transaksi-transaksi ril yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas yang harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah, sehingga informasi yang disajikan akan memiliki nilai serta informasi keuangan yang dapat bermanfaat bagi para penggunanya.

Laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas pegawai yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan

berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pernyataan itu sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Widari dan Sutrisno bahwa sebuah laporan yang memiliki nilai akan memberi manfaat bagi penggunanya yang menandakan laporan keuangan tersebut berkualitas dalam hal ini laporan keuangan tidak lepas dari prinsip-prinsip tepat waktu dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Banyaknya fenomena pelaporan keuangan pemerintah di temukan oleh badan pemeriksaan keuangan. Berikut adalah hasil pemeriksaan laporan keuangan Kanwil Kementerian Agama Papua, yang memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan dimulai pada tahun 2016. Seiring berjalan waktu maka untuk mencapai wajar tanpa pengecualian yang ditargetkan tidak sesuai dengan harapan pada Tahun 2020 Laporan Realisasi Anggaran selama periode berjalan beberapa kali mengadakan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), realisasi pendapatan, pengakuan Gaji , penggunaan modal, bantuan sosial dan realisaai belanja bantuan sosial mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 bahkan pada tahun 2021 laporan keuangan tersebut dinyatakan disclaimer.

Berdasarkan fenomena di atas menggambarkan bahwa *good governance* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah belum diterapkan. Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut haruslah akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Hal yang mendasar dan penting dari Penerapan Akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sistem akuntansi. Sistem ini diwujudkan agar nanti tercipta informasi laporan keuangan yang menggambarkan kondisi

keuangan serta kinerja dari suatu daerah (Siregar, 2016:96). Menurut Septiani (2013:64) sehubungan dengan pentingnya akuntansi keuangan dalam membuat laporan keuangan pemerintah, maka diharapkan untuk menggunakan system akuntansi keuangan karena dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Sedangkan menurut Hanifah dan Pratoyo (2015:3) bahwa system akuntansi keuangan ialah berbagai prosedur yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan suatu skema yang menyeluruh dan ditujukan untuk menghasilkan informasi berbentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh septian (2013:73) bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hanifa, dkk. (2016:75). Mengungkapkan bahwa system akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, efektifitas dan responsibilitas merupakan bagian dari *good governance* (Maryani,2016:2). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu system pengendalian internal. Menurut (Nurillah dan Muid, 2014) system pengendalian internal memiliki beberapa fungsi seperti sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukuran pengujian efektivitas penyelenggara system pengendalian internal pada pemeritahan. Selain itu kebijakan dan prosedur pengendalian internal juga berfungsi untuk mencapai sasaran serta menjamin

dan menyediakan informasi keuangan yang andal dan menjamin hukum dan peraturan yang berlaku ditaati. Pemerintahan yang memiliki system pengendalian internal yang lemah, akan menyajikan laporan keuangan yang tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yensi dkk. (2014:12) bahwa tidak ada pengaruh antara system pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kalumata dkk. (2016: 163) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tuti Herawati, 2014) bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hilda Sri Hastuti (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Hilir”. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa good governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating. (Studi Pada Kanwil Kementerian Provinsi Sulawesi Selatan)” merupakan penelitian

terdahulu oleh NUR RAHMASARI ACHMAD (2018). Hasil penelitian tidak dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan terhadap tata kelola yang baik dengan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan diarahkan pada manfaat praktis dan manfaat teoretis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi keperilakuan yaitu mengenai kualitas laporan keuangan dan faktor – faktor yang mempengaruhi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah khususnya kanwil kementerian agama provinsi papua untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan publik yaitu mempertimbangkan penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan menjadi good governance.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Sistematika Penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kontigensi

2.2 Teori Technology Acceptance Model (TAM)

2.3 Good Governance

2.4 Penerapan Standar Akuntansi

2.5 Sistem Informasi Akuntansi

2.6 Kualitas Laporan Keuangan

2.7 Kerangka Berpikir

2.8 Pengembangan Hipotesis

3. BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

3.2 Pendekatan Penelitian

3.4 Populasi dan Sampel

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.6 Instrumen Penelitian

3.7 Definisi Operasional an Ruang Lingkup Penelitian

3.8 Metode Analisis

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

4.1 Hasil Penelitian

4.2 Analisis Deskriptif Variabel

4.3 Analisis Deskriptif Pernyataan

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.6 Hasil Uji Hipotesis

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Keterbatasan Penelitian

5.3 Saran

Daftar Pustaka

Lampiran